

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam setiap peristiwa selalu memancarkan hikmah. Barangkali bagi kita sebagai umat beriman tatanan spirit hikmah itu akan menyembulkan makna kemenangan. Namun bisa jadi pancaran hikmah tadi jika didekati dari perspektif ilmu postmodernisme justru akan melahirkan tantangan-tantangan baru sekaligus kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak pernah terduga dan disangka-sangka. Demikian pula analogi (qiyas) tadi jika diterapkan pada peristiwa 11/9 WTC siapapun tidak akan pernah menduga bahwa pasca peristiwa itu mengakibatkan sekian puluh derajat politik global berubah secara signifikan.

Seminggu sebelum kejadian tersebut hampir semua orang menyatakan Amerika Serikat (AS) telah berhasil mengembangkan politik unilateral di tengah bermunculannya kuncup pesaing baru dari dunia timur seperti yang dilansir Huntington. Namun seminggu dari kejadian itu siapa sangka jika perubahan kedua gedung tersebut -yang diyakini sebagai simbol kapitalisme global- ternyata juga telah meluluhkan politik Abrasi unipolar AS. Dunia bergembira dan merayakan kegembiraanya dengan bersulang ria. "AS tinggal puing" kata negara-negara pesaing. Tapi siapa sangka jika akibat serangan itu AS tambah bersemangat memabat musuh-musuhnya. Dengan menggunakan term terorisme AS menggalang kekuatan sekutu untuk melenyapkan musuh baru maupun lama yang diprediksi akan menjadi cikal kekuatan baru abad 21. memang, pasca peristiwa itu tatanan global berubah menjadi multipolar dengan aktor-aktor baru meliputi negara-negara Eropa barat dan kawasan Asia Pasifik. Namun akibat dari perubahan politik global yang tidak menampilkan satu negara polar sebagai kutub "hakim" berpijak maka turbulensi politik dunia malah semakin tampak anarkhis.

Sebuah *games* yang anarkhis dan brutal kembali terjadi. Tak lebih dari penyerangan AS dan sekutunya ke Afganistan dan Irak yang sampai saat ini belum ditemukannya alasan rasionalnya membuktikan bahwa hubungan negara bangsa ini masih diliputi semangat kehendak buta seperti yang lontarkan filosof Arthur Schopenhauer.

Pola kerjasama negara yang mengembangkan multilateralisme dimana bentuk kerjasama, konsultasi, dialog, diplomasi lebih dikedepankan ternyata hari ini juga telah membuat suasana menjadi abu-abu. Sebab walaupun pengaruh AS dinilai telah berkurang terbukti dengan ketika Washington melontarkan opsinya untuk menyerang Iran yang buntutu ditolak Inggris sebagai partner utama menyerang Irak, disamping Australia, akan tetapi peristiwa ini memicu beberapa negara berniat memperkuat dirinya dengan memanfaatkan is baru yang bertumpu pada penggunaan kekuatan militer. Aroma rivalitas antar negara yang justru sering terjadi dalam wadah organisasi multilateral seperti dalam EAS (*East Asia Summit*) yang baru didirikan 2005 lalu terasa kental sekali. Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Jepang misalnya berkepentingan untuk mengimbangi pengaruh Cina di kawasan ini. Sebaliknya Cina dan India yang dekade ini perkembangan pembangunannya melesat cepat juga tak mau ketinggalan tentu ingin memainkan peran dan pengaruh lebih besar di kawasan. Singkat kata antara musuh dan kawan sama-sama menyelusup dalam baju yang sama.

Tentu saja hal ini bagi Indonesia harus menyiapkan stamina ganda. Selain kesiapan teknis lobi juga yang paling pokok adalah kesiapan dalam pembangunan infrastruktur penunjang didalam pengamanan untuk pencapaian tujuan cita-cita luhur bangsa seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. yaitu melindungi kedaulatan negara dan keamanan rakyatnya. Berbicara pengamanan kedaulatan negara utamanya kedaulatan wilayah nasional tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok lembaga TNI. Realisme internasional mengatakan

bahwa negara yang besar adalah negara yang mampu menyiapkan strategi pertahanan negara (*deterrence atau defence*) secara mutlak. Sebab tidak ada jaminan bahwa ketidaksepakatan antara dua negara terhadap sebuah isu akan berakhir di meja runding. Yang sering terjadi bahkan sebuah negosiasi terjadi dibawah acungan moncong rudal. Barangkali gambaran tepat situasi itu adalah seperti yang dikatakan jendral Clausewitz yaitu bersiap perang dalam keadaan damai (*si vis pacem para bellum*).

Sesungguhnya tidak ada yang suka menyimpan rudal dalam barak militer suatu negara namun penyerangan terhadap Irak adalah pelajaran berharga bahwa negara yang terkenal dengan rudal scudnya saja hancur dalam hitungan hari bagaimana dengan kondisi Indonesia yang militernya sudah terkena sanksi suku cadang sejak peristiwa Dili 1999. Barangkali kita sebagai bangsa tidak ada yang menyukai perang namun realisme internasional menyebutkan bahwa ada kamus politik yang menyatakan perang sebagai kelanjutan dari strategi politik.

Barangkali situasi internasional itulah yang memang mengharuskan TNI harus berbenah diri menyongsong masa depan. Barangkali itu pula sewindu reformasi (1998-2006) politik Indonesia banyak lembaga publik yang telah mengalami perubahan signifikan. Tak terkecuali reformasi peran dominan TNI yang dimasa Orba bernama ABRI. Apakah kajian ini justru akan mencoba menyeret ke dalam pertikaian baru? justru kajian inilah yang akan menunjukkan bahwa kekuatan nasional bangsa akan semakin bervariasi yang bertumpu pada pola keseimbangan kekuatan informasi, diplomasi dan daya tahan ekonomi. Bagi saya membaca visi strategi TNI justru akan memudahkan kunci tertibnya politik kawasan (*Si Vis Pacem Parra Bellum*).

Membaca TNI dalam perkembangan lingkungan strategis kawasan utamanya kawasan Asia pasifik dalam pembangunan pertahanan negara adalah langkah wajib negara dalam memenangkan perang (*survivability*) dimasa depan. Seperti kata pepatah lama bahwa

jawaban pasti setiap ketidakpastian adalah kesiapan itu sendiri. "*siapa menghendaki damai maka harus bersiap untuk berperang*".

Oleh karena itu, membaca TNI dalam kecenderungan lingkungan strategis Hankam Asia Pasifik 2020 adalah ibarat membaca bangsa ini dalam menyusun visi *outlooking ward* bangsa di tengah pergaulan politik luar negeri yang *chaos* selama ini.

B. Tujuan penelitian

Secara garis besar tujuan penelitian ini akan berkisar pada pembahasan sebagai berikut; Fakta awal tahun 1980-90-an kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang melakukan pembangunan system persenjataan konvensional dan modern paling pesat di dunia. Ditambah perubahan strategis pasca perang dingin dari pola hubungan bipolar ke multipolar, dari persaingan ideologis ke persaingan semakin kuatnya kekuatan-kekuatan integratif dan fragmentatif serta makin dominannya komunitasnya-komunitas keamanan regional oleh sebab itu, tujuan penelitian ini berkisar pada;

Pertama, sebagai penuntun aktual termasuk perkembangan jumlah kuantitas dan kualitas kekuatan persenjataan negara kawasan Asia Pasifik. Termasuk juga sebagai landasan dan pembahasan pertimbangan untuk membuat prediksi mengenai perubahan kekuatan militer negara kawasan Asia Pasifik.

Kedua, penelitian ini berusaha mencoba menelusuri peta kekuatan militer TNI dalam konteks pembangunan infrastruktur dan suprastruktur internalnya dalam tarikan dan dorongan kecenderungan perubahan peta politik global khususnya di negara-negara kawasan Asia Pasifik.

Ketiga, ketika penelitian ini sudah mendapat temuan informative tentang peta kekuatan militer kawasan yang sedang gencar-gencarnya dibangun negara-negara dikawasan Asia Pasifik maka langkah selanjutnya adalah menentukan prediksi di masa mendatang untuk

mengambil preskriptif tentative untuk kemudian diterapkan dalam grand strategi TNI Raya.. Hal ini penting dilakukan sebab arah langkah perkembangan persenjataan dalam dunia militer kadang kala bersebrangan dengan arah politik luar negeri suatu negara.

C. Latar Belakang Permasalahan

“security is primary about the fate of human collectivities....about the pursuit of freedom from threat. The bottom line is about survival, but it also includes a substantial range of concerns about the condition of existence...security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environmental” (Barry Buzan)

Ketika disuruh memilih sebenarnya lebih enak mana posisi negara berkembang seperti Indonesia apakah dalam tata politik global bipolar seperti di era perang dingin dengan tingkat kontestasi keamanan antar negara terkendali ataukah dalam system multipolar namun tingkat kompetisi negara cenderung dalam security dilemma? sebuah pertanyaan yang sama-sama sulit dijawab. Begitulah sekiranya gambaran politik internasional dewasa ini.

Pasca perang dingin, era itu sempat menyebarkan nada optimis akan lahirnya era *peace dividend* antar negara. Sehingga dunia ini hanya akan mengurus kesejahteraan warga negara yang sempat teriris dengan perang dingin dan perang-perang destruktif lainnya, yang selanjutnya tentu saja dunia akan memasuki era produktivitas ekonomi tinggi karena dana cadangan perang dialihkan. Namun apa yang terjadi? optimisme semacam itu sirna sebab yang terjadi adalah turbulensi dimana perang besar berhenti tetapi perang kecil-kecil terjadi di berbagai regional wilayah. Dulu, di era perang dingin hampir bisa dikatakan kontestasi persenjataan militer hanya berpusat pada AS dan Soviet. Sekarang, hampir semua negara dalam region didapati fakta bahwa belanja militernya meningkat tajam. Survey *Stockholm*

¹ Barry Buzan, (et,al), *Security: A New framework of Analysis*, London, Liene Riener, 1998, dalam AA. Banyu Perwita, Pengantar dalam, *MencarFormatKomprehensif systemPertahanan dan Keamanan Negara*, Tim Propatria Institute, Jakarta, 2006.

International Peace Research Institute (SIPRI) pasca perang dingin mendapati pembelian barang militer khususnya oleh negara-negara Asia meningkat dari 15% tahun 1982 menjadi 34%.

Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi besar tentunya pengembangan wacana sekaligus penataan strategi sistem pertahanan dan keamanan negara adalah hal yang mutlak dilakukan. Meski demikian, penggagasan wacana ini seringkali menimbulkan persolan dilematis sekaligus berujung pada kebuntuan jalan. Betapa tidak!, pertahanan keamanan (Hankam) di negara seperti Indonesia sudah dianggap *public good* yang pengembangannya harus semanfaat dan selinear dengan program peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga seringkali pengembangan wacana pembangunan pertahanan negara (TNI) selalu disandingkan dengan tingkat pengembalian manfaat kepada rakyat. Seringkali pembangunan (belanja militer) dihadapkan dengan perbandingan budget pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya.

Di sisi lain instabilitas politik global utamanya di kawasan Asia Pasifik walaupun lebih banyak ditengarai pergolakan persaingan antar negara hanya pada bidang ekonomi antar negara tetapi yang harus dipahami adalah akibat gesekan-gesekan investasi ekonomi itulah yang kadang-kadang memunculkan juga pada pertikaian secara fisik (melibatkan kekuatan militer) beberapa negara walaupun dalam taraf kecil. Namun toh demikian kemungkinan-kemungkinan tersebut tetap ada. Apalagi posisi geografis Indonesia yang berada dipersimpangan benua dan samudera menjadikan gangguan instabilitas nasional akan sangat berdampak pula pada instabilitas pembangunan ekonomi global. walaupun ungkapan ini kelihatan klise namun sesungguhnya mengandung kebenaran mutlak. Sebab jaminan keamanan nasional utamanya pada penangkalan setiap upaya perongrongan keutuhan kepentingan nasional bisa berdampak luas. Padahal yang harus dipahami adalah dalam

system multipolar seperti sekarang tidak ada jaminan di masa depan Indonesia akan terbebas dari ancaman militer (perang) dari negara lain.

Oleh sebab itu, kata Letjen (purn) Sayidiman, menanggapi pendapat dari kalangan yang beranggapan bahwa pembangunan kapabilitas militer hanya akan menghamburkan uang adalah, salah sasaran sebab logikanya jika ide penolakan pembangunan pertahanan negara hanya karena kita ingin tampil sebagai negara besar dengan mengutamakan perdamaian karena justru negara besar adalah negara yang mampu menjalankan faktor pertahanan dan keamanannya secara efektif.

Kalau diibaratkan dalam bahasa yang mudah diproses akal silogismenya seperti ini. Inti pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Keamanan prasyarat tercapainya pembangunan. Oleh sebab itu untuk mencapai kesejahteraan maka keamanan (pertahanan) harus menjadi dimensi mutlak dalam sebuah pembangunan. Dalam banyak kasus di negara-negara lain berbagai projek pembangunan yang dijalankan akhirnya justru juga menjadi bagian dari penguatan isu pertahanan dan keamanan negara (upaya perlindungan kepada rakyat).

Secara garis besar dikawasan Asia Pasifik yang dikenal wilayah paling dinamis kompetisi aktor negara maupun non negara memunculkan persaingan yang tidak bisa dianggap remeh. persaingan yang bahkan mengarah kepada bentuk permusuhan tersebut kalau diprotet secara makro mendeskripsikan perilaku yang kontraproduktif. Sebagai misal relasi AS dengan Cina yang sejak tahun 1970-an membaik pasca perang dingin situasinya berubah total sebab keduanya malah beralih kepada persaingan super power baru sehingga intrik-intrik politik luar negeri yang mengandalkan kekuatan militer keduanya kelihatan kentara. Belum lagi relasi Cina- Jepang sebagai dua negara tetangga yang bersaing dalam pembangunan ekonomi mengakibatkan peluang adu fisik mudah tersulut.

dibutuhkannya kemampuan identifikasi berbagai aspek pertahanan dan keamanan sehingga akan menjadi *guidelines* bagi arah tindakan yang akan diambil. Di Indonesia para stakeholder itu adalah dipegang TNI sebagaimana dimantapkan Tap MPR VII/2000.

Kendati akurasi kemampuan prediksi sangat bervariasi paling tidak dengan perencanaan itu akan menjadi semacam alat kompas. Untuk *what to be done, where is to be, how is it to be done, when is to done and who should do it*.⁶ Semua itu sebagai jembatan antara kondisi riil dengan kondisi yang akan kita capai di masa mendatang (*expect condition*).

D. Rumusan Masalah

Berdasar prasaran awal materi diatas bahwa dampak perubahan-perubahan dalam lingkungan strategis Indonesia patut untuk direspon secara kreatif oleh masyarakat khususnya TNI maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut "***Bagaimanakah strategi TNI dalam bidang Hankam yang seharusnya dijalankan dalam merespon perubahan global di kawasan Asia Pasifik 10-15 tahun ke depan?***"

E. Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian ini adalah seperti yang dilansir Daoed Joesoef bahwa kajian strategi berarti sebagai keseluruhan keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang terjadi di masa depan. Strategic studies kata Daoed Joesoef mencakup perkiraan-perkiraan mengenai sesuatu yang akan terjadi dan kemudian berusaha menyiapkan tindakan-tindakan yang tepat untuk menanggulangi kerawanan-kerawanan bila yang diperkirakan itu memang terjadi.⁷ semua itu dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yang meliputi kepentingan-kepentingan yang menyangkut keutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan kebangsaan yang bebas, kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, serta peranan di dunia internasional.

⁶ Lihat AA Banyu Perwita *Op.Cit*,t Halaman 4

⁷ Yahya Muhaimin, *Op Cit*, Halaman 20

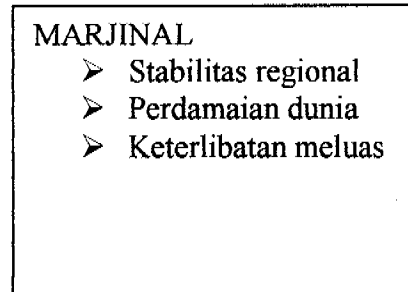
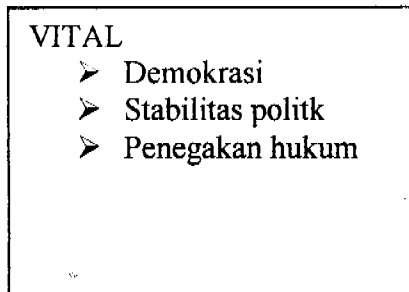
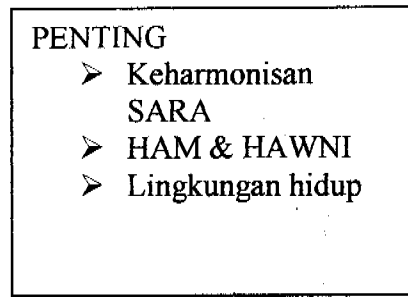
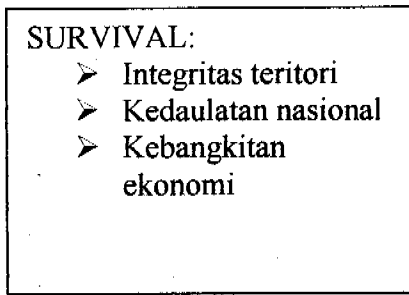
Adapun secara tertibnya maksud dari kepentingan nasional bangsa Indonesia itu secara umum terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

*"Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD negara Indonesia yang terbentuk dari susunan berdasar 'Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'"*⁸

Dalam pada itu, sedang yang dimaksud kepentingan nasional menurut beberapa ahli politik dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Yaitu kepentingan nasional yang bersifat permanent dan kepentingan nasional yang tidak permanent. Sifat pengkategorisasian permanent tidak permanent juga sangat cair. Misalnya, bisa jadi desakan pembubaran Kodam, Kodim, Koramil yang termasuk dalam Komando territorial pada hari ini sangat diperlukan demi hilangnya kecurigaan public terhadap akan kembalinya tentara ke panggung sosial politik. Namun di masa mendatang barangkali justru komando territorial diperlukan sebab peningkatan sifat ancaman terhadap lahan vital negara. sehingga ini berarti pada prinsipnya kepentingan nasional pendefinisiannya sangat cair dan tergantung prioritas langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu dalam mewujudkan pembangunan. Contoh lainnya adalah lebih prioritas mana mengambil kebijakan memelihara prestise bangsa atau peningkatan kesejahteraan dalam kondisi bangsa yang sedang terpuruk seperti sekarang.

pada prinsipnya ada yang dinamakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis dan ada kepentingan nasional yang bersifat abadi. Sebagai contoh berikut digambarkan prioritas kepentingan nasional yang akan dilaksanakan pemerintah berdasar masa kerja 2005-2009:

⁸ Lihat C.P.F. Luluhima, *Beberapa Dimensi Pol Luar Negeri Indonesia*, dalam *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, J. Kristiadi dkk (Peny), CSIS, Jakarta, 1995



Kepentingan Nasional (2009-2014)

Seperti tertera dibagan kepentingan nasional digambarkan sebagai sebuah kebutuhan berdasar permintaan skala prioritas. Ada kepentingan yang harus terlaksana (survival) ada kepentingan yang bisa dikatakan marjinal. Namun kesemuanya unsur tadi merupakan satu kesatuan yang perwujudannya mempersyaratkan satu dengan lainnya. Contohnya. Walaupun kebutuhan penguasaan territorial negara sangat penting namun apa jadinya jika kebutuhan territorial itu tidak terpelihara dengan baik dengan jaminan stabilitas. Maka yang terjadi adalah chaotic (kekacauan berlarut). Demikian sebaliknya dan seterusnya kepentingan nasional didefinisikan secara berkesinambungan berdasar skala prioritas pembangunan sebuah negara.

Dan biasanya pokok-pokok kepentingan nasional itu dicantumkan dalam ketetapan MPR maupun UU sebagai petunjuk jalan bagi eksekutif.⁹

⁹ Yahya Muhaimin, *Op.Cit*, Halaman 24

Meski demikian nota MPRS No. 1/MPRS/1966 yang telah disempurnakan dengan nota No.4/PIMP/1968 antara lain menegaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia secara umum dapat dipilin mencakup usaha peningkatan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Dan visi itu harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan untuk melindungi setiap elemen bangsa.

Sedangkan maksud dari kepentingan itu sendiri adalah bahwa semua model pembuatan keputusan yang dijalankan baik menyangkut keputusan politik luar negeri maupun politik domestik diformulasikan untuk demi kelangsungan hidup (survival) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politik nasional serta memelihara identitas kulturalnya.

Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan hasil realisasi mendefinisikan situasi yang mencakup keadaan eksternal dan internal negara bangsa yang dianggap relevan.¹⁰

Sedang menurut Hans Morgenthau berpendapat bahwa yang dimaksud dari kepentingan nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan nasional yang saling bertentangan; ini bukan suatu ideal yang dicapai secara abstrak dan saintifik tetapi merupakan hasil dari persaingan internasional internal yang berlangsung terus menerus. Pemerintah melalui lembaga-lembaganya yang pada akhirnya paling bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional.¹¹

Keberadaan TNI sebagaimana diamanatkan Tap MPR no.VII/2000 dan Tap no.VI/2001 serta didukung UU no.34/2004 serta garis besar UU no.32/2004 dinyatakan bahwa eksistensi TNI harus menjadi pendorong stabilitas nasional dari ancaman pihak

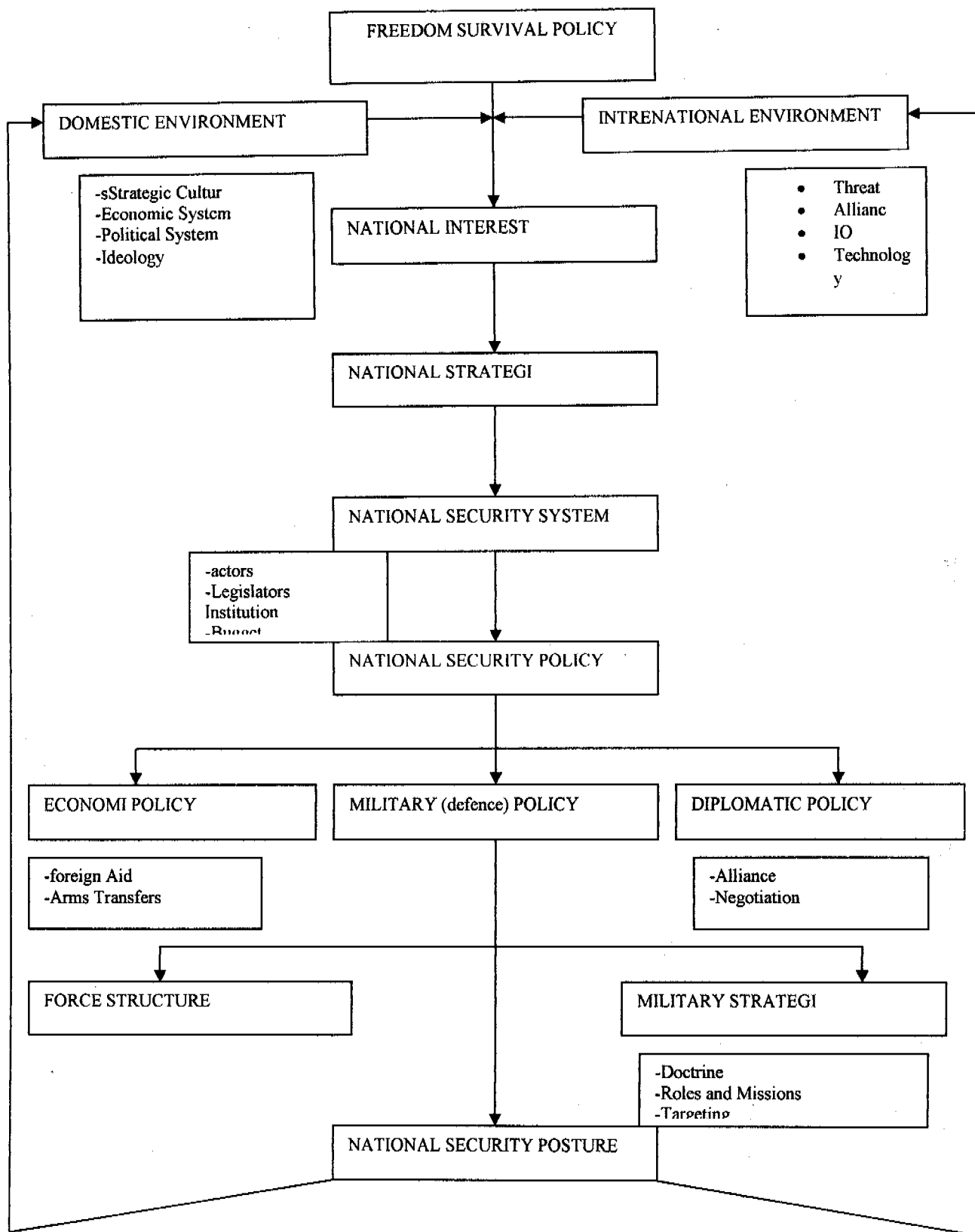
¹⁰ Djumadi Anwar, dalam , *Diktat Kuliah Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*, Edisi Revisi, Jogjakarta, 1994

¹¹ Hans Morgenthau, *Politik antar Bangsa, (terj)*, Yayasan Obor, Jakarta, 1984

eksternal. Oleh karena itu, keberadaanya di tengah-tengah elemen bangsa lainnya adalah sebagai garda terdepan dalam penangkalan dan pertahanan terhadap setiap gangguan stabilitas yang mengganggu serta mengancam kepentingan nasional. Sebagaimana diagram tata urutan berikut ini yang didesain AA Banyu Perwita sesungguhnya demikianlah tata rencana kerja sebuah grand strategi sebuah negara dalam konstelasi politik domestik dan atau lingkungan internasional. Dimana nasional security postur adalah tujuan utama sebuah bangsa dalam rangka mencapai freedom survival (membela integritas kemerdekaan bangsa). Dimana *military policy* merupakan salah satu bagian untuk mewujudkan itu disamping *ekonomi policy* serta *diplomacy policy*.

Selain misalnya pendapat Barry Buzan yang mengatakan bahwa kemampuan menentukan survivabilities negara dewasa ini sangat ditentukan banyak factor.¹² Kembali menurut AA. Banyu Perwita kemampuan menentukan tingkat pertahanan dan keamanan sebuah negara maka *policy* yang diambil harus mempersyaratkan kondisi dan atas dukungan situasi lingkungan strategis masa kini. Berikut pengembangan skema merancang system pertahanan dan keamanan negara secara menyeluruh. "Freedom Survival Policy" oleh AA. Banyu Perwita:

¹² Lihat Barry Buzan, dalam *Security: A New framework for Analysis*, London 1998 dalam Andi Widjajanto "Keamanan dan Aktor Keamanann", Awidajajanto/Keamanan/2003 diambil tanggal 2 Mei 2006



Di Indonesia, salah satu institusi yang memiliki tugas mengawal kepentingan nasional terutama dalam upaya pertahanan negara terhadap kemungkinan penyerangan pihak lain sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 30 adalah TNI dalam fungsi pertahanan negara. Namun sedikit sebagai acuan kajian ini saya tampilkan sedikit sosok sejarah pelabelan TNI dari waktu ke waktu yang terus mengalami perubahan nama sekaligus peran dan fungsinya. Tercatat sepanjang 60 tahun usianya (2005) sejak angkatan perang ini ditetapkan sebagai tentara garda bangsa yang sebelumnya berasal dari milisi perang kemerdekaan telah berganti nama sebanyak tiga kali lebih. Tentara nasional ini dalam masa orde lama bernama Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada tahun 1959 sebutan APRI diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Melalui UU No.13/1961 pasal 3, Keppres No.225/1962, Keppres No.290/1964 menetapkan kepolisian Negara RI adalah ABRI. Dengan demikian, ABRI meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara RI.¹³ Pada masa awal Orba berkuasa militer Indonesia masih menggunakan sebutan ABRI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI terhitung sejak diberlakukannya Keppres No. 290/1964 tanggal 12 Januari 1964 di mana Angkatan Kepolisian RI ditetapkan sebagai Angkatan Bersenjata yang kedudukannya sama dan sederajat dengan ketiga angkatan lainnya dengan garis komando dan hirarki yang utuh.¹⁴ Namun pada tanggal 27 Juni 1969 melalui Keppres No.52/1969 terjadi perubahan nama Angkatan Kepolisian (AKRI) menjadi Kepolisian RI (POLRI) namun kedudukannya tetap berada di bawah ABRI dan kedudukan secara organisatoris tetap dibawah Dephankam/Pangab. Kemudian melalui Keppres No.80 /1969, Keppres No.7/1974 ditetapkan bahwa ABRI terdiri dari 3 angkatan yaitu TNI AD,

¹³ Lihat Buku *Peraturan Perundang-undangan Pertahanan dan Keamanan RI Dephankam 1996*, halaman 88 dalam Arif Yulianto, *Hubungan Sipil Militer Pasca Orba; di Tengah Pusaran Demokrasi*, Rajawali Pers Jakarta 2001 Halaman 27.

¹⁴ Lihat Arif yulianto, *Op.cit.*, Halaman 28

TNI AL, TNI AU dan 1 POLRI yang selanjutnya dikukuhkan melalui UU No.20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg RI yang salah satunya menyebutkan bahwa ABRI adalah inti TNI yang dipimpin oleh panglima ABRI yang kedudukannya di bawah presiden selaku kepala negara. Kemudian pada masa Reformasi terhitung sejak mulai tanggal 1 April 1999 yang dapat dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan militer adalah bukan lagi ABRI melainkan TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Sedang POLRI secara organisasi terpisah dari TNI dan berdiri sendiri dengan kedudukan langsung di bawah presiden. Sedangkan TNI tetap berada di bawah komando panglima TNI yang kedudukannya di bawah presiden sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.¹⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Demikianlah, seperti diketahui bersama bahwa penelitian ini jika diamati dari judulnya didapat kesimpulan bahwa penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian preskriptif. Yakni penelitian yang bertujuan untuk *to predict*. Artinya penelitian ini berusaha untuk memprediksikan sekaligus memberi resep atau obat akan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan TNI sebagaimana TNI dalam melihat kecendrungan lingkungan Asia Pasifik yang sedang berubah ini. hasilnya bisa jadi bermanfaat untuk mengevaluasi, merubah atau bahkan juga mengetahui dampak peristiwa yang akan berlangsung di masa depan (*to evaluate, to change, to asses social impact*)¹⁶ sehingga nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat berbentuk analisis deskriptif sebagai bahan untuk memahami suatu masalah (*to understand*).

Sumber data yang akan dijadikan sarana objek *tool of analisis* dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sekunder. Yaitu data yang diambil bukan dari hasil data primer yang didalamnya termasuk data primer adalah hasil *deeft interview* dan /atau hasil dari kegiatan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Jakarta, 1994.

FGD (*focus group of discussion*). Data sekunder ini adalah data yang diambil dari hasil kerja penelusuran informasi yang sudah tersaji. Bisa jadi lewat pengkajian berbagai buku yang berhubungan, kliping media cetak maupun informasi media audio visual yang dipercaya sebagai sumber valid. Untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan analisis preskriptif dengan melihat kecenderungan komtemporer dunia dewasa ini.

G. Jangkauan penelitian

Rentang waktu penelitian dan pengkajian tema pokok ini adalah mencakup rentang masa sampai tahun 2020. mengapa angka 2020? pertama, sesuai Tap MPR no.VII/2001 tentang visi masa depan Indonesia yang mencantumkan visi antara sebagai bagian dari perwujudan cita-cita luhur (alinea 4 UUD 1945) serta visi lima tahun dalam Propenas. Kedua, angka 2020 adalah angka yang pas untuk menentukan prediksi perubahan radikal politik dunia karena untuk melihat perubahan dunia jangka waktu lima tahun belum bisa dikatakan cukup untuk melihat posisi perubahan. Sehingga angka yang pas adalah mencakup satu decade untuk membuat satu prediksi. Ketiga, sebab kajian strategis ini adalah kajian prediksi maka fakta dan data yang dipakai tetap data masa kini selain data sejarah masa lalu sebagai data pendukung utama meliputi masa akhir perang dingin, pasca serta masa musim semi reformasi politik Indonesia ditambah perubahan radikal politik global sejak peristiwa 9/11 WTC. Sebab masa-masa itu adalah masa-masa penting untuk melihat arah alur gerak politik dunia yang sangat berpengaruh terhadap dinamika politik domestic. Diharapkan dari kajian sekumpulan fakta dan data tersebut selanjutnya dapat digunakan tongkat estafet merancang strategi masa depan TNI dalam melintasi edisi 5-10 tahun mendatang.

H. Hipotesa

Pertama, bisa diprediksikan kecenderungan arah politik global utamanya Asia Pasifik akan mendayung diantara dua model relasi yang berbentuk *balance of power* atau setidaknya *concert of power* namun bisa dipastikan tidak akan menjangkau tahap *universal security model*.

Kedua, untuk membangun dimensi pertahanan RI yang kuat dimana TNI sebagai aktor utama dengan mempertimbangkan lingkungan strategis 10-15 tahun ke depan maka strategi TNI adalah mengubah pola pertahanan dari berbasis pulau-pulau besar beralih kepada pertahanan matra laut.

Ketiga, di tingkatan pergaulan global strategi TNI dalam 5-10 mendatang sembari melakukan penguatan paradigma tentang perlunya penguatan konsep pertahanan nasional sebagai *public good* dimata rakyat yang hasil akhirnya semua itu akan kembali kepada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam pada itu TNI harus pintar-pintar melakukan strategi yang dinamakan *soft form of power* yaitu kemampuan melakukan memanipulasi interdependensi kekuatan dengan melalui cara pintar-pintar menjalin kerjasama multilateral dengan semua negara. Selama tidak mampu pintar mengolah manipulasi kekuatan maka perairan Indonesia diibaratkan akan tetap seperti jalan tol yang siapapun bebas melintas karena memnganggap TNI hanya sebagai sesosok patung yang tegap di pinggir jalan namun tidak bisa menidak pelanggaran yang terjadi didepan matanya sendiri. Seperti yang dikatakan tokoh marketing dunia Al Ries bahwa sebuah persepsi efeknya lebih besar dan lebih efektif berpengaruh dari pada sebuah kenyataan itu sendiri.

I. Sistematika Penulisan

Supaya lebih enak dibaca dan sistematis dalam uraian logika berpikir maka urutan penulisan hasil kajian ini adalah sebagai berikut;

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Fakta dan data serta kecenderungan lingkungan eksternal Indonesia (faktor eksternal)

Bab III. Fakta dan data kebijakan internal di dalam tubuh TNI yang sedang dan telah dijalankan serta rencana arah strategi yang akan dijalankan. Dari situ diharapkan didapat kecenderungan kemampuan mengukur kekuatan pemerintahan nasional dalam hal ini TNI dalam upaya memasak grand strategi TNI dalam bidang kemananan nasional utamanya dimensi pertahanan dari setiap ancaman dimasa yang akan datang (Faktor internal)

Bab IV. Desain grand strategi Hankam TNI yang seharusnya dijalankan dalam rangka perumusan tindakan preskripsi (resep proyek masa depan).

Bab V. kesimpulan dan penutup.